

MAMPU KITA

KABAR DARI KITA



KABAR DWI BULANAN PROGRAM MAMPU

EDISI KHUSUS 14/2020

GERAK KELOMPOK PEREMPUAN AKAR RUMPUT MELAWAN PANDEMI

Menghadapi Corona, Ibarat Perang Melawan Makhluk Halus

(Dikisahkan oleh Farida Hanum, PEKKA Sumatera Utara)

Desa Sentang merupakan desa pesisir yang terletak di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Faridah, salah seorang anggota Serikat PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) di desa ini memiliki usaha jual beli hasil laut dan mengolahnya untuk pembuatan bahan makanan seperti terasi.

Semenjak wabah Corona merebak, semua aktifitas terhenti. Tidak ada transaksi jual beli hasil laut. Kepanikan yang timbul tidak hanya karena harus mencari cara menghindari terjangkit Corona, tetapi juga cara bertahan hidup; tetap bisa makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Kami justru khawatir mati bukan karena virus Corona, melainkan mati karena kelaparan," ungkap Faridah, janda dengan 7 orang anak.

Sebelum pandemi COVID-19, Faridah bersama beberapa anggota PEKKA yang lain setiap sore mengolah berbagai hasil laut, seperti udang kotak yang mereka bersihkan dan kupas kulitnya kemudian dijual kembali ke pengusaha untuk diekspor. Sekarang keadaan sungguh berbeda; Faridah tidak bisa bekerja karena tidak ada pasokan udang. Kegiatan ekspor impor pun terhenti paska imbauan dari pemerintah terkait pembatasan sosial.



Kesulitan yang Faridah hadapi berlipat dengan datangnya cobaan lain. Air PAM yang tidak lagi mengalir di wilayah mereka mengakibatkan warga harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah lebih dari 3 bulan tidak keluar. Faridah juga sudah tidak mampu membayar cicilan bank, yang ia pinjam untuk modal usaha hasil laut.

Faridah bertanya kapan masa sulit ini akan berakhir? Kapan kita semua bisa bangkit lagi agar bisa mencari rezeki dengan tenang? Apa yang sebenarnya kita perangi?

Ketahanan Pangan Selama Pandemi: Cerita Perempuan Sumatra



Komunitas bertukar bahan pangan

Pada akhir Maret 2020 lalu, Gubernur Provinsi Bengkulu secara resmi menyatakan bahwa wilayahnya merupakan zona merah penyebaran COVID-19.

Situasi ini berdampak luas terhadap masyarakat di berbagai kalangan. Salah satunya adalah kelompok perempuan petani sayur di Kabupaten Rejang Lebong, tepatnya di Desa Sumber Urip, yang mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Sebelum pandemi melanda, komunitas perempuan petani sawit dan sayur mayur dapat menghasilkan hingga Rp200.000 per hari. Setelah pemerintah setempat memberlakukan pembatasan sosial, penghasilan rata-rata mereka hanya berkisar antara Rp60.000 – Rp80.000 per hari. Tak jarang pula warga kehilangan penghasilan

utama dari berladang. Hal tersebut dipengaruhi oleh anjloknya harga sawit dan sayur mayur dengan adanya pembatasan aktivitas pasar dan persaingan antar petani.

Suhartini (47) yang berasal dari desa ini, yang merupakan Ketua Credit Union (CU) Harapan Perempuan setempat, didampingi WCC Cahaya Perempuan - PERMAMPU, mitra MAMPU di Bengkulu, menginisiasi pendataan mandiri dampak pandemi terhadap kesehatan dan ekonomi warga di sekitarnya.

"Hasil pendataan dari masing-masing kepala keluarga dilaporkan ke Bidan Desa dan Puskesmas agar segera ditindaklanjuti, karena Karena sudah terdapat beberapa ODP dalam sejumlah rumah tangga," Suhartini memberikan informasi. Hingga pekan pertama April 2020, terdapat 10 warga Desa Sumber Urip yang terdata sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP).

WCC Cahaya Perempuan mengembangkan berbagai materi edukasi tentang pencegahan penularan COVID-19 yang kemudian disebarakan melalui pesan singkat dan aplikasi pesan, seperti WhatsApp.

"CU bekerja sama dengan Puskesmas, Babinkamtibnas, Karang Taruna dan kelompok PKK mengajarkan warga membuat cairan disinfektan agar mereka dapat membersihkan rumahnya masing-masing," tukas Suhartini.

Kelompok perempuan petani di Desa Sumber Urip merupakan salah satu kelompok yang mengalami dampak ekonomi cukup berat dilihat dari beban ganda yang mereka pikul. Berangkat dari situasi ini, Kelompok CU Harapan Perempuan menginisiasi sebuah gerakan untuk ketahanan pangan warga secara mandiri, khususnya bagi anggota kelompok CU yang terdampak pandemi.

Inisiatif tersebut diberi nama "Perempuan Berbagi Hasil Panen untuk Ketahanan Pangan Keluarga". Gerakan ini mengumpulkan hasil panen sayur-mayur yang dihasilkan anggota kelompok CU untuk saling ditukarkan dengan jenis sayur atau bahan pangan lain, seperti ikan yang dibudidayakan oleh sesama warga desa.

Suhartini berharap inisiatif ini dapat terus berjalan selama masa pandemi. "Setidaknya memenuhi kebutuhan kita sampai situasi membaik dan bisa kembali beraktivitas seperti semula."

Dana desa untuk bibit tanaman

Serupa dengan kondisi yang dialami kelompok perempuan di Bengkulu, Ruslia—seorang ibu dari satu anak yang berprofesi sebagai guru dan penjual makanan di Desa Karya Mulyo Sari, Kabupaten Rokan Hilir, Riau ini mulai merasakan dampak pandemi Covid-19 sejak pertengahan Maret lalu.

Karena khawatir tertular saat berinteraksi dengan pembeli, Ruslia memutuskan untuk hanya berjualan secara *online*. "Tidak hanya kegiatan belajar mengajar, penghasilan dari berdagang makanan juga menurun. Saya takut berjualan dan bertemu dengan pembeli", ujarnya.

Ruslia menyadari bahwa kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat sekitarnya cukup berat sejak adanya pandemi. "Untuk



mencukupi kebutuhan keluarga, saya mengambil uang tabungan di koperasi. Dan saya tahu bahwa warga lain juga pasti sangat kesulitan."

Sebelum pandemi, rata-rata penghasilan anggota koperasi Mutiara Rokan berkisar antara Rp 1,5 hingga Rp 3 juta per bulan. Namun kesulitan ekonomi mulai terjadi sejak pandemi yang menyebabkan penghasilan mereka turun hingga di bawah Rp 1 juta setiap bulannya.

Ruslia yang sehari-hari turut aktif dalam pendampingan PPSW, jaringan Permampu ini pun tidak mau tinggal diam. "Saya usulkan kepada Kepala Desa agar warga dibantu untuk dapat menanam sayur mayur di rumah mereka masing-masing. Usulan tersebut disetujui Kepala Desa hingga ada alokasi Dana Desa untuk pembelian dan distribusi bibit tanaman," ujarnya bangga.

Program pembagian bibit kepada warga Desa Karya Mulyo Sari tersebut mulai berlangsung sejak 5 April lalu untuk mendukung ketahanan pangan warga desa secara mandiri. Melalui program tersebut, setiap rumah memperoleh 5 jenis bibit sayuran seperti terung, selada, brokoli, gambas, cabe rawit, kacang panjang, sawi, dan tomat.

Ruslia berharap program menanam di rumah sendiri ini dapat berlangsung secara terus menerus dan meringankan beban ekonomi keluarga di tengah masa sulit ini.

"Program ini membantu menghemat pengeluaran rumah tangga, dan semoga dapat memenuhi kebutuhan gizi di masa pandemi."

Dari ladang, ke pekarangan, hingga mesin jahit

Afriyati (53), anggota Kelompok Perempuan Usaha Kecil (KPUK) dampingan LP2M di Kabupaten Padang Pariaman, bersama suaminya telah lama menggeluti usaha pembibitan tanaman obat dan sayur mayur di pekarangan rumah mereka. Mereka memasarkan tanaman dan hasil panennya kepada warga sekitar secara langsung, dari mulut ke mulut.

"Tapi sejak wabah Corona, jangankan ada yang beli, mampir ke rumah saja tidak ada," tukas Afriyati mengenai penjualan bibit tanamannya. "Dengan menanam sayur di kebun sendiri, saya dan suami tidak perlu sering-sering ke pasar dan bertemu orang banyak."

Berbeda dengan kisah Afriyati, Zilnovita—anggota kelompok dampingan LP2M di Kabupaten Tanah Datar, Padang, Sumatra

Barat—mengadvokasi pemerintah setempat untuk menyediakan masker kain bagi seluruh warga *nagari* sebagai langkah pencegahan COVID-19 yang juga memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Zilnovita bersama kelompoknya mengadvokasi Wali Nagari Pangian untuk bekerja sama dengan masyarakat desa memproduksi masker kain.

“Sejauh ini, saya selalu berusaha mencukupi kebutuhan gizi seimbang keluarga saya, namun itu saja tidak cukup. Kita perlu alat pelindung diri ketika harus beraktivitas di luar,” ujar Zilnovita.

Sama halnya dengan Zilnovita, Misdar—perempuan paruh baya yang telah memiliki cucu dari Nagari Tanjung Bonai—juga mengalami pergeseran mata pencaharian. Sebelum pandemi, Misdar bekerja sebagai petani ladang dan penjahit. Namun karena penurunan daya beli masyarakat, Misdar kini hanya menekuni usaha jahit demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

“Saat ini harapan saya hanya dari pesanan masker kain. Saya dan kelompok meminta kepada Wali Nagari Tanjung Bonai agar kelompok perempuan dapat tetap berpenghasilan dengan memproduksi masker.”

Misdar juga tidak pernah lupa berpesan kepada anak dan cucunya untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, tidak hanya untuk menghindari COVID-19, tetapi juga agar mereka dapat hidup produktif lebih lama.

Selain membuat masker, bersama kelompok dampingan PPSW, Zilnovita dan Misdar turut mendukung komunitas warga tani yang mengalami kerugian besar akibat penurunan penjualan hasil panen dengan membantu pemasaran melalui WhatsApp dan Facebook.

Balai Sakinah 'Aisyiyah Dorong Pemerintah Desa Kerja Sama Tanggap Pandemi



Pipit Marliani (42), tinggal di Desa Licin, Sumedang, Jawa Barat. Sehari-harinya, Pipit berprofesi sebagai Kepala Sekolah sekaligus pengajar di Kelompok Bermain Peduli Anak Bangsa di desa tempat tinggalnya.

Pipit dan para anggota Balai Sakinah 'Aisyiyah—kelompok dampingan 'Aisyiyah, Mitra Program MAMPU, merasakan dampak pandemi yang mengubah kebiasaan hidup sehari-hari

masyarakat hingga dampak terhadap perekonomian desa.

Untuk itu, Pipit dan anggota BSA lainnya mendorong Kepala Desa untuk membentuk tim satgas COVID-19 di Desa Licin dan melakukan pendataan secara menyeluruh untuk penyaluran bantuan sosial.

“Awalnya karena ada kekhawatiran banyaknya warga berstatus ODP yang berdatangan dari luar kota yang kembali ke desa setelah merantau, bekerja, atau kuliah, saya mengusulkan dibentuknya satuan tugas (satgas) COVID-19 ke Kepala Desa”, terang Pipit.

Selain satgas, Kelompok BSA Desa Licin juga mendorong pembentukan Posko pendataan COVID-19 agar pendataan dan penanggulangan lebih terorganisir dengan baik.

Berbagai upaya seperti edukasi pencegahan COVID-19 dan mengorganisir kelompok perempuan setempat untuk membuat masker kain menggunakan bahan yang tersedia.

Surima, kader BSA di Desa Kartiasa, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat melakukan upaya serupa dengan Pipit. Ia

menyampaikan bahwa produksi masker kain secara kolektif oleh para anggota BSA menghasilkan 600 masker.

“Kami buat dan kami distribusikan terutama kepada kawan-kawan penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat yang kurang mampu,” jelas Surima.

Kelangkaan masker di Desa Kartiasa menjadi motivasi Surima dan kawan-kawan menginisiasi pembuatan dan pembagian masker ini hingga diapresiasi dan diadopsi oleh Pemerintah Desa Kartiasa.

“Kepala Desa merencanakan satu keluarga akan mendapatkan 6 helai masker. Setelah dihitung untuk seluruh masyarakat Desa Kartiasa membutuhkan kurang lebih sembilan ribu helai masker”, Surima menambahkan.

Gerakan 9.000 masker oleh pemerintah desa akan terus dikawal dan didampingi oleh kelompok BSA setempat. Selain menjalankan upaya pencegahan, gerakan ini juga berpotensi memberikan pemasukan bagi perempuan yang sebagian besar kehilangan pendapatan karena terdampak pandemi COVID-19.

“Alhamdulillah, menjahit masker menjadi penghasilan bagi 20 perempuan yang terlibat selama di rumah saja karena pemerintah desa membayar seribu rupiah per helai masker,” lanjut Surima.



Tidak hanya membagikan, kelompok BSA juga giat membagikan informasi dan tips menggunakan dan membersihkan masker kain.

“Kami bagikan dan edukasi bahwa masker kain ini hanya boleh digunakan selama 4 jam, setelah itu harus dicuci dengan sabun, dijemur, dan disetrika sebelum dapat digunakan kembali.”

Pembagian masker juga dilakukan dengan mematuhi anjuran pembatasan jarak sosial, dan mengutamakan keselamatan petugas dan masyarakat setempat.

Kelompok Konstituen di Lombok Timur Hadapi COVID-19

(Oleh Baiq Titis Y. & Baiq Indira F.)

Berbagi Paket Nasi dan Sabun untuk Menghadapi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang kini tengah melanda dunia telah merenggut banyak korban jiwa termasuk di Indonesia. Setelah pemerintah menetapkan masa tanggap darurat, pemerintah daerah dan masyarakat bahu-membahu berperan aktif untuk memutus rantai penyebaran virus.

Nursihum dan anggota Kelompok Konstituen, Mitra MAMPU di Kecamatan Selong, Lombok Timur pun turut berpartisipasi. Bersama anggota Kelompok Konstituen yang lain, Nursihum terlibat dalam komunitas yang fokus pada penguatan ekonomi masyarakat. Mereka memproduksi dan menjual detergen cair dan sabun mandi sebagai salah satu sumber pendapatan.



Untuk meringankan beban sesama, kelompok ini juga berinisiatif membagikan paket nasi bungkus gratis setiap hari Jumat. Paket diberikan bersama dengan sabun pencuci tangan dan minuman herbal dari rempah lokal yang merupakan hasil produksi Kelompok Konstituen.

“Ini yang bisa kami lakukan bagi masyarakat. Memberikan paket nasi bungkus, sabun cuci tangan dan minuman herbal. Semoga dapat membantu pemerintah mengatasi wabah ini”, ungkap Nurmihsum dengan bangga.

Paket bantuan dibagikan kepada kaum dhuafa, pemulung, petugas kebersihan (pasukan kuning), lansia, tukang parkir, yatim piatu, serta petugas SPBU. Pembagian difokuskan di beberapa desa di Kabupaten Lombok Timur, seperti Desa Kaliasan, Desa Serewe, Desa Sembalun dan Desa Bumbang.

Pipit dan Surima menunjukkan pentingnya mendengarkan suara dan melibatkan peran mereka dalam proses perencanaan hingga implementasi tanggap darurat. Perlindungan perempuan sebagai aktor penting dalam upaya kesehatan masyarakat juga menjadi langkah mendasar yang tidak dapat diabaikan oleh seluruh pihak yang terlibat, khususnya di saat perempuan menjalankan sebagian besar peran-peran strategis yang menyangga pilar kesehatan masyarakat selama pandemi berlangsung.

Kepala Desa Cepat Tanggap Hadapi COVID-19

Yahya, mantan Ketua Kelompok Konstituen (KK) Desa Kembang Kerang, Lombok Timur kini telah menjadi Kepala Desa. Beliau dengan segala kapasitas dan kewenangannya melakukan berbagai tindakan pencegahan penyebaran COVID-19.

Sejak awal Februari, Yahya telah mengikuti perkembangan COVID-19 melalui beragam kanal berita.

“Saat itu saya berpikir kalau sudah ada korban yang positif di Jakarta maka ada kemungkinan menyebar ke daerah lainnya termasuk di wilayah saya. Saya harus melindungi masyarakat saya, dengan atau tanpa instruksi pemerintah pusat”, tukas Yahya.

Dari pemahaman ini Yahya langsung berkoordinasi dengan kepala dusun untuk memperketat pemantauan masyarakat yang baru kembali dari luar daerah maupun luar negeri, agar segera melapor dalam 1x24 jam dan melakukan pemeriksaan kesehatan jika ada gejala.

Sejak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menetapkan status Tanggap Darurat COVID-19 pada 16 Maret 2020 lalu, Yahya segera berkoordinasi dengan Puskesmas Aikmel, Babinsa, Polmas, BPD, LKMD, dan Kepala Wilayah. Koordinasi tersebut menyepakati perlunya memperketat akses keluar masuk di Desa Kembang Kerang, dengan wajib lapor 1x24 jam ke ke kader atau RT bagi warga yang baru pulang dari luar daerah atau luar negeri. Bagi mereka yang baru kembali dari luar negeri atau luar daerah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, dengan pengawasan tenaga medis. Pemerintah Desa memberikan bantuan paket sembako bagi masyarakat yang diisolasi, melakukan penyemprotan disinfektan pada fasilitas umum satu kali seminggu, menyiapkan sabun dan tempat cuci tangan di setiap gang dan menyiapkan 7.000 masker bagi masyarakat yang diproduksi oleh masyarakat setempat. Pemerintah Desa juga sepakat untuk menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis di desa dan membentuk Tim Relawan COVID-19 Desa Kembang Kerang.

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kembang Kerang dibiayai dari Dana Desa. Tim Relawan COVID-19 Desa Kembang Kerang adalah garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Tim ini bertugas untuk memberikan informasi terkait COVID-19 kepada masyarakat serta melakukan pemeriksaan jika ada yang mempunyai gejala sakit.

Bagian Humas Desa Kembang Kerang menyebarkan informasi

melalui beragam cara, yaitu penyuluhan di rumah ibadah, penyuluhan dengan mobil keliling, serta melalui media sosial. Melalui kegiatan ini, masyarakat mengetahui perkembangan terbaru terkait COVID-19 dan memahami prosedur pencegahan COVID-19 di desa. Banyak pula warga yang akan pulang kampung melapor diri melalui nomor kontak yang tertera di media sosial Humas Desa Kembang Kerang.

Pada awalnya, Yahya berencana mencairkan dana santunan anak yatim dan lansia lebih awal selama masa tanggap darurat. Sayangnya anggaran tanggap bencana yang telah dialokasikan dalam dana desa tidak mencukupi. Oleh karena itu, Yahya mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

"Kami saat ini tengah melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, tidak hanya untuk pencegahan saja, tetapi juga untuk kemungkinan terburuk lain yang akan terjadi", ucap Yahya.

Yahya yang juga Ketua Ikatan Kepala Desa (IKADA) Kecamatan Aikmel, melakukan koordinasi dengan kepala desa lainnya untuk bersama dan bahu-membahu melawan pandemi ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengirimkan surat pernyataan sikap dan dukungan bagi pemerintah kabupaten dan



provinsi untuk melakukan isolasi dan karantina bagi masyarakat yang masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyambut baik usulan tersebut, lalu mewajibkan semua masyarakat yang masuk ke Lombok Timur untuk memeriksakan kesehatan di Pendopo Kantor Bupati. Mereka yang terindikasi mengalami gejala COVID-19 akan langsung dikarantina di Rusunawa Kecamatan Peringgabaya. Sementara yang dalam kondisi sehat akan dikembalikan ke desa dengan membawa surat keterangan sebagai ODP (Orang Dalam Pemantauan).

Yahya percaya dengan kerjasama yang solid, pandemi COVID-19 dapat dilawan.

Sekolah Perempuan di Pangkajene Kepulauan Terus Berlayar di Tengah Pandemi



Terdapat 18 Sekolah Perempuan (SP) binaan KAPAL Perempuan dan Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Sekolah-sekolah ini telah merangkul 507 perempuan di 10 pulau.

Kehidupan anggota SP dan warga masyarakat lainnya di wilayah ini juga tak luput dari dampak pandemi COVID-19. Beragam dampak pandemi COVID-19 yang ditemui di wilayah ini di antaranya: pendapatan para anggota SP turun; karyawan di perusahaan pengolahan kepiting dirumahkan tanpa digaji; KDRT dan kekerasan terhadap anak marak terjadi; dan usaha ekonomi masyarakat miskin seperti penjual sayur keliling, penjual kue dan kios kecil yang terpaksa tutup.

Namun, para anggota SP tidak tinggal diam. Mereka sigap bahu-membahu dengan warga sekitar melakukan berbagai kegiatan, serta secara khusus memperhatikan kebutuhan para perempuan di 10 pulau.

Ketika Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan, para anggota SP mendesak pemerintah desa untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Penularan COVID-19. Gugus Tugas lalu dibentuk dengan beranggotakan pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan anggota SP.

Anggota Gugus Tugas bertanggungjawab mendata masyarakat miskin dan usaha ekonomi kecil yang terdampak COVID-19, melakukan disinfeksi fasilitas umum, mengedukasi masyarakat terkait COVID-19, serta membuka posko pemeriksaan di dermaga setiap pulau untuk memantau pergerakan masyarakat dalam dan antar pulau.

Anggota SP terlibat aktif dalam pendataan dan pembagian sembako kepada masyarakat miskin di Desa Mattiro Uleng dan Desa Mattiro Baji. Selain itu, ada pula beragam kegiatan khas perempuan yang dilakukan oleh anggota SP untuk membantu sesama perempuan di pulau.

Pertama, SP di Pulau Sabutung membuka layanan bimbingan belajar (tutor) bagi para ibu yang mendampingi anak mereka mengerjakan tugas sekolah. Kegiatan ini bermula dari aduan anggota SP yang kesulitan mendampingi anak dalam mengerjakan tugas, serta keluhan beratnya biaya tambahan untuk pembelian data internet sekolah daring. Keadaan ini direspon dengan membuka layanan tutor. Ada dua cara yang ditempuh: 1) Tutor mendatangi rumah dan mengajarkan anak dengan memperhatikan protokol kesehatan; 2) Tutor menerima pertanyaan dari para ibu melalui aplikasi WhatsApp, lalu memberikan dampingan dalam mengerjakan tugas tersebut via WhatsApp. Tutor juga bisa

membantu mengirimkan tugas kepada guru sehingga anak-anak tidak membutuhkan kuota internet terlalu banyak. SP menyiapkan 5 orang tutor yang membantu 17 anak anggota SP.

Kedua, membuka jasa titip gratis bagi masyarakat yang ingin berbelanja di daratan. Anggota SP yang akan ke daratan untuk membeli kebutuhan sehari-hari akan menerima daftar belanja titipan dari perempuan lain dan membantu membelikannya. Pihak yang menitip hanya membayar biaya belanjanya saja dan tidak membayar biaya transportasi perahu dan ojek. Ini sangat membantu para ibu di pulau di saat situasi sulit seperti ini.

Ketiga, membuat masker kain. Para ibu dan remaja anggota SP yang memiliki keahlian menjahit, membuat masker dan dibagikan gratis ke masyarakat miskin, lansia dan disabilitas. Pada saat pembagian masker juga diberikan surat edaran dari SP yang menjelaskan tentang COVID-19, cara pencegahan, penularan, dan nomor-nomor kontak anggota SP yang bisa dihubungi bila ada pertanyaan terkait COVID-19 serta cara memakai, membuka dan mencuci masker. Saat ini telah ada 500 masker yang dibagikan ke masyarakat di 10 pulau.

Keempat, membantu penyaluran donasi berupa paket sembako dan uang tunai di wilayah kepulauan. Anggota SP menerima donasi dari beberapa pihak yaitu Ibu Saparinah Sadli, kitabisa.com dan KAPAL Perempuan. Paket bantuan telah didistribusikan kepada 80 kepala keluarga miskin di 10 pulau.

Kelima, membantu masyarakat miskin menuntut token listrik gratis. Para anggota SP membaca berita dan mencari tahu



tata-cara mengajukan permintaan token listrik gratis melalui internet. Setelah berhasil mencobanya ke meteran listrik sendiri, mereka lalu segera membantu masyarakat miskin lainnya agar dapat menikmati token listrik gratis dari pemerintah. Ada 450 rumah masyarakat miskin yang telah menikmati listrik gratis ini di 10 pulau.

Terakhir, membuka ruang diskusi melalui telepon, SMS, WhatsApp dan Zoom terkait COVID-19. Beberapa tema diskusi yang diangkat antara lain tentang COVID-19, cara pencegahan, penularan, mengenal berbagai makanan bergizi di pulau yang dapat meningkatkan imun tubuh, pendampingan kepada masyarakat yang mengalami KDRT, serta mengupas berita-berita hoaks tentang COVID-19.

Dalam keadaan sulit seperti ini, Sekolah Perempuan Pulau terus berlayar, bahu-membahu melawan COVID-19.

Pekerja Rumahan Bahu Membahu Atasi Dampak Ekonomi dari COVID-19

Pekerja rumahan merupakan salah satu pekerja yang paling rentan dan tidak terlihat dalam rantai pasok. Meski keberadaannya telah diakui secara internasional melalui ILO, namun di Indonesia pekerja rumahan belum dilindungi dalam undang-undang.

Pekerja rumahan seringkali bekerja keras dalam kondisi yang tidak aman, bekerja berjam-jam, dan tanpa perlindungan hukum atau keamanan kerja, untuk pembayaran yang umumnya jauh di bawah upah yang layak.

Keadaan tersebut diperparah oleh mewabahnya COVID-19 di Indonesia. Menurut catatan Trade Union Rights Center (TURC),

salah satu mitra MAMPU dalam penguatan ekonomi perempuan, setidaknya 355 dari 671 orang pekerja rumahan perempuan yang mereka dampingi di beberapa wilayah seperti Jakarta Utara, Sukabumi, Cirebon dan Sukoharjo tidak lagi mendapatkan pekerjaan dari pemberi kerjanya.

Awalnya mereka bekerja di beberapa kegiatan usaha seperti menjahit, mengelem sandal, melipat dan mengelem tas kertas. Di Jakarta Utara sendiri, ada 80 orang pekerja rumahan yang tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali.

Dengan keprihatinan tersebut, Muhayati dan Een sebagai pengurus JPRI Jakarta yang didampingi oleh TURC, mencoba membantu pekerja rumahan yang bekerja membuat tas kertas dengan melakukan advokasi ke pemberi kerja agar mendapatkan bantuan. Hasilnya, pemberi kerja memberikan paket nasi dan ayam bagi para pekerja rumahan.

Selain ke pemberi kerja, Muhayati dan Een juga menghubungi salah satu lembaga filantropi yaitu Sarah Charity yang selama ini turut mendukung kegiatan pendidikan anak usia dini di wilayah Jakarta Utara. Sarah Charity memberikan bantuan paket sembako berupa beras, telur, minyak goreng dan mie instan bagi 100 orang pekerja rumahan dan sejumlah warga kurang mampu di wilayah tersebut.



Muhayati dan Een juga berinisiatif untuk melakukan sterilisasi di RT mereka. Namun, karena pihak kelurahan belum menyediakan anggaran khusus untuk melakukan penyemprotan di wilayah RT, maka pekerja rumahan berinisiatif menggalang dana untuk membeli cairan disinfektan serta menyewa alat penyemprotan serta menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap di rumah dan mengurangi interaksi sosial.

Setelah anggaran terkumpul dan dibelikan obat disinfektan serta menyewa alat semprot, pekerja rumahan yang tergabung dalam kader posyandu dibantu pihak RT dan kelurahan setempat berkeliling melakukan sterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan sekaligus sosialisasi untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19.

Bertahan di Tengah Pandemi COVID-19, 62 Penjahit Perempuan Mitra MAMPU Bekerjasama dengan Jahitin.com

Terbatasnya akses perempuan terhadap pekerjaan formal membuat banyak dari mereka akhirnya memilih menjadi pekerja informal seperti pekerja rumahan. Namun, tanpa kontrak formal dengan pemberi kerja, para perempuan pekerja rumahan sangat terpuak oleh dampak COVID-19 terutama setelah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota di Indonesia.

Untuk mengatasi dampak ekonomi yang dialami oleh para pekerja rumahan, Program MAMPU menginisiasi kerjasama dengan Jahitin.com, badan usaha sosial (*social enterprise*) asal Indonesia yang menghubungkan para penjahit perempuan di seluruh negeri dengan pembeli. 62 penjahit perempuan yang berasal dari kalangan pekerja rumahan dan pemilik usaha mikro yang didampingi oleh mitra MAMPU, mendaftar untuk berpartisipasi dalam inisiatif Jahitin.com ini.

Berdaya dari Desa, Kader DESBUMI Dukung Tim Gugus Tugas COVID-19 di Indramayu

Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan oleh pekerja di dalam negeri, namun juga para perantau seperti pekerja migran Indonesia (PMI). Kondisi negara penempatan yang menerapkan karantina wilayah menyebabkan sebagian mereka memilih atau justru terpaksa pulang ke wilayah asal. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat, hingga 29 Maret 2020 sekitar 33.503 pekerja migran Indonesia tiba di tanah air. Selain kehilangan pendapatan, tidak jarang mereka juga mendapatkan stigma negatif di wilayah asal.

Namun di Desa Juntinyuat, Indramayu, hal tersebut tidak terjadi. "Sejak awal kita telah menghimbau masyarakat agar tenang dan tidak panik," jelas Diyana, salah satu kader Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) Desa Juntinyuat yang juga merupakan salah satu anggota aktif gugus tugas COVID-19 di wilayahnya. Bahkan hingga saat ini para PMI yang pulang dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Qatar, dan Australia tetap tenang dan patuh mengikuti aturan untuk tetap di rumah selama 14 hari.

TURC sendiri juga telah menggerakkan para perempuan pekerja rumahan dalam "Gerakan Masker untuk Semua" di beberapa kota dampingan yakni Cirebon, Sukoharjo, Sukabumi dan Jakarta. Gerakan yang dimulai pada 27 April 2020 lalu ini bertujuan untuk menyediakan masker bagi seluruh lapisan masyarakat terutama para penduduk desa yang lebih sulit mendapatkan masker.

Masker dibuat oleh para pekerja rumahan yang memiliki keterampilan menjahit, dengan standar yang telah ditentukan WHO. Selain membagikan masker, TURC juga mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga tentang tata cara pencegahan COVID-19 dengan membagikan flyer, pemasangan poster, dan pemasangan spanduk di balai desa.

Seluruh penjahit perempuan nantinya akan diberikan panduan teknis secara daring dan disediakan paket bahan lengkap untuk memproduksi alat pelindung diri (APD) yakni baju hazmat oleh Jahitin.com. APD yang diproduksi akan disalurkan sesuai memenuhi permintaan pasar di wilayah dimana mitra MAMPU bekerja yaitu di Medan (BITRA), Yogyakarta (Yasantil), Jember (Migrant CARE) dan Sambas (Aisyiyah).

Kemitraan ini juga bertujuan untuk memberikan alternatif pendapatan kepada para penjahit perempuan.

"Salut untuk Jahitin.com yang telah melibatkan perempuan pekerja rumahan secara langsung. Semoga ke depannya kerjasama yang terjalin semakin kuat dan pekerja rumahan bisa mendapatkan manfaat langsung sekaligus kontribusi untuk pencegahan COVID-19," begitu harapan Amin Muftiyah, Direktur Yayasan Annisa Swasti, salah satu mitra MAMPU yang mendampingi perempuan pekerja rumahan di Yogyakarta.



"Bersama dengan pemerintah desa, kami membangun posko sebagai bentuk kepedulian desa dalam mencegah penyebaran virus. Posko ini dilengkapi dengan pencatatan kedatangan warga dari luar negeri dan luar daerah sehingga lebih terkontrol," lanjut Diyana.

Dalam mencegah masuknya COVID-19 di desa tersebut, para anggota komunitas DESBUMI ikut terlibat secara aktif untuk melaporkan kedatangan warga dari luar daerah dan luar negeri kepada tim penanggulangan COVID-19. Tim kesehatan nantinya akan mendatangi dan mengecek kesehatan warga tersebut serta memantau lewat nomor kontak yang diberikan.

Selain pelaporan, anggota komunitas DESBUMI juga terlibat dalam pembuatan dan pembagian masker di wilayah desa bersama PKK dan tim penanganan COVID-19. Sebagai upaya menjaga kebersihan wilayah desa, Tim Satgas COVID-19 juga melakukan penyemprotan

seminggu sekali dan membagikan paket sabun cuci tangan untuk setiap mushola dan masjid yang terdiri dari meja, galon air, sabun, tisu, ember, dan poster arahan mencuci tangan.

DESBUMI merupakan model layanan pengawasan berbasis desa yang diinisiasi oleh mitra MAMPU yakni Migrant CARE yang bertujuan untuk membantu pekerja migran mengakses informasi tentang migrasi aman. Melalui DESBUMI, pekerja migran mendapatkan pendampingan terkait hak-hak pekerja, penanganan kasus, pelatihan keterampilan pasca-migrasi serta pengembangan sumber pendapatan alternatif.

LBH Apik: Perempuan Rentan Tertular Virus, Rentan Juga Menjadi Korban Kekerasan di Masa Pandemi COVID-19

Komnas Perempuan mencatat 11.105 kasus KDRT yang dilaporkan terjadi di Indonesia (CATAHU, 2020). Angka ini diprediksi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Apik) Jakarta akan meningkat di laporan tahun depan, salah satunya karena dampak COVID-19.

Sebelum pandemi, rata-rata LBH Apik Jakarta menerima 60 laporan kasus kekerasan setiap bulannya. Sejak pembatasan fisik dan sosial diberlakukan Maret lalu, LBH Apik Jakarta sudah menerima 97 kasus kekerasan terhadap perempuan (catatan 16 Maret-19 April 2020). Dari 97 kasus ini, jumlah yang paling besar dilaporkan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu 33 kasus, disusul oleh kekerasan berbasis gender online (KBGO) 30 kasus, pelecehan seksual 8 kasus, kekerasan dalam pacaran (KDP) 7 kasus, pidana umum 6 kasus, perkosaan 3 kasus, kasus di luar kekerasan berbasis gender 3 kasus, perdata keluarga 2 kasus, pinjaman *online* 2 kasus, dan kasus warisan, pemaksaan orientasi seksual, serta permohonan informasi layanan masing-masing 1 kasus.

"Hal ini menjadi bukti bahwa rumah belum tentu menjadi tempat aman bagi perempuan, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Perempuan menjadi semakin rentan bukan saja rentan tertular virus, tetapi juga rentan menjadi korban kekerasan," ungkap Direktur LBH Apik Jakarta Siti Mazumah.

Menurut Zuma, beban perempuan bertambah besar selama masa pembatasan fisik dan sosial khususnya perempuan dengan keluarga yang patriarkis. Peran sebagai pengasuh, pendidik, penjaga kesehatan keluarga semua dilakukan oleh perempuan. Bukan tidak mungkin ini menjadi pemicu terjadinya KDRT ketika perempuan dianggap tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Menyusul KDRT, angka kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) juga cukup tinggi. Zuma berpendapat ini salah satu dampak dari tingginya ketergantungan terhadap internet selama masa pembatasan fisik dan sosial. LBH Apik menerima laporan beragam bentuk kekerasan berbasis online yaitu pelecehan seksual secara *online*, ancaman penyebaran konten intim dengan motif eksploitasi seksual, hingga pemerasan *online*.

Dalam masa pemberlakuan *Work From Home*, LBH APIK Jakarta tetap memberikan layanan kepada korban kekerasan berupa konsultasi hukum via *online*, merujuk ke psikolog dengan layanan via *online*, mengarahkan korban untuk melakukan tindakan awal ketika mengalami kekerasan seperti melakukan foto jika memar atau luka, memberikan nomor kantor polisi terdekat agar korban segera mendapatkan pertolongan, pendampingan dalam sidang *online*, serta tetap memberikan layanan rumah aman sementara ketika beberapa rumah aman pemerintah dan milik lembaga keagamaan tutup dalam masa pandemi.

Tentang MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

MAMPU adalah program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Program ini mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan membangun kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan, sehingga akses perempuan terhadap pelayanan dasar dan program pemerintah meningkat.

Informasi Lebih Lanjut:
Website: www.mampu.or.id
Twitter: @ProgramMAMPU
Email: info@mampu.or.id

Edisi Khusus
14/2020

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan